

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan sebuah awal dalam hal peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Tujuan utama otonomi daerah adalah tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan landasan demokrasi yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat. Upaya penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber kebijakan yang cukup memadai sesuai dengan batas-batas peraturan perundang-undangan.

Permasalahan-permasalahan yang ada di setiap daerah muncul sejalan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada daerah tersebut. Proses pertumbuhan daerah tidak luput dari permasalahan-permasalahan lahan yang dihadapinya, antara lain: masalah kependudukan, ekonomi, kesehatan, urbanisasi, dan transportasi.² Permasalahan yang ada di daerah berpangkal

¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²Parsudi Suparlan, 2003, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm.

pada semakin pesatnya laju pertumbuhan penduduk, baik yang disebabkan oleh faktor alami yaitu perbandingan antara jumlah kelahiran dan kematian maupun yang disebabkan oleh faktor urbanisasi. Arus perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain yang sulit dikendalikan jumlahnya, sehingga menyebabkan perubahan besar terhadap penduduk.

Menurut Hofmeister, kota adalah suatu pemusatan keruangan dari tempat tinggal dan tempat kerja manusia yang kegiatan umumnya di sektor ekonomi sekunder dan tersier dengan pembagian kerja dalam arus lalu lintas yang beraneka antara bagian dan pusatnya. Pertumbuhannya sebagian besar disebabkan oleh bertambahnya kaum pendatang yang mampu melayani kebutuhan-kebutuhan barang serta jasa bagi wilayah yang jauh jangkauannya. Kota berfungsi sebagai tempat bermukim, tempat kerja, tempat hidup, dan tempat berekreasi. Jadi sudah selayaknya apabila kota harus didukung berbagai sarana dan prasarana yang cukup. Salah satu permasalahan yang ada di setiap kota adalah transportasi. Transportasi adalah bagian yang terpenting dari sebuah kota. Kota modern terdiri atas tiga hal, yaitu: konstruksi materi, relasi sosial, dan transportasi.³ Transportasi menyinggung langsung kebutuhan pribadi warga kota dan berkaitan langsung dengan kehidupan ekonomi, sehingga peranan transportasi sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan hidup sebuah kota. Kota adalah pusat pelayanan, sebagai penyelenggara dan penyedia jasa-jasa bagi warganya.⁴

³N. Daljoeni, 2008, *Geografi Kota dan Desa*, Cetakan ke 4, Bandung : Alumni, hlm. 44.

⁴*Ibid.*, hlm.38.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah diberi wewenang untuk menentukan pendapatan daerah yang perlu untuk dilakukan pengaturan dalam proses penarikan dan retribusi daerah untuk kemudian dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai perwujudan adanya pelaksanaan otonomi daerah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu retribusi yang cukup menjanjikan untuk kota Klaten dan turut membiayai pelaksanaan otonomi daerah adalah retribusi parkir di tepi jalan umum. Karena semakin berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat hiburan yang berdampak pada kepadatan lalu lintas di ruas-ruas jalan kota Klaten, maka Pemerintah menggunakan tepi jalan umum sebagai tempat parkir.

Masalah yang sering muncul dalam perparkiran yaitu munculnya parkir liar dan premanisme. Timbulnya parkir liar biasanya pada tempat-tempat yang ramai pengunjung, seperti gedung pertemuan, warung makan, dan taman kota. Selain itu ada juga permasalahan karcis atau tanda parkir, karcis parkir seringkali tidak diberikan pada pengguna jasa parkir, khususnya pengguna jasa parkir di tepi jalan umum, ada juga petugas parkir yang mengganti karcis dengan kartu yang dibuat sendiri tanpa ada dasar pijakan peraturan yang jelas.

Perparkiran di kota Klaten sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Pada realitasnya peraturan ini belum konsisten dilaksanakan. Terjadinya sejumlah praktek penyimpangan

yang merugikan konsumen dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kota Klaten. Penarikan retribusi parkir yang sering ditemukan di lapangan ialah retribusi yang ditarik melebihi ketentuan dan tidak diberi karcis. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, untuk kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dan untuk kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). Tarif retribusi parkir tersebut untuk 4 (empat) jam pertama, kemudian untuk 4 (empat) jam kedua ditetapkan sebesar 150%.

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁵ Retribusi adalah salah satu faktor yang menentukan besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu Pemerintah Kota Klaten terus mengupayakan agar pendapatan dari retribusi daerah dapat meningkat. Retribusi dari sektor perparkiran ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan mengingat perubahan kondisi perekonomian di kota Klaten, semakin berkembangnya pusat-pusat pembelanjaan dan pusat-pusat hiburan yang berdampak pada kepadatan lalu lintas di ruas-ruas jalan kota Klaten. Supaya terwujud ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas perlu adanya pengelolaan yang baik dalam hal ini perparkiran terutama ditepi jalan-jalan umum.

⁵Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Tanpa disadari hal ini telah merugikan masyarakat pengguna jasa parkir non berlangganan di tepi jalan umum. Ketidak efektifan yang dilakukan oleh juru parkir ini perlu mendapat perhatian yang lebih dari Dinas Perhubungan sebagai pihak yang berkopetensi dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan perparkiran, sehingga para juru parkir dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka tidak dapat dilepaskan dari masalah pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, oleh karena itu diperlukan sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial tersebut antara lain dari sektor pajak dan retribusi. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah diberi wewenang untuk menentukan pendapatan-pendapatan daerah manakah yang perlu untuk dilakukan pengaturan dalam proses penarikan pajak dan retribusi daerah untuk kemudian dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai perwujudan adanya pelaksanaan otonomi daerah⁶. Untuk Kota Klaten, salah satu retribusi yang cukup menjanjikan untuk turut membiayai pelaksanaan otonomi daerah adalah retribusi parkir di tepi jalan umum, karena dengan semakin berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat hiburan yang berdampak pada kepadatan lalu lintas di ruas-ruas jalan kota Klaten, maka pemerintah menggunakan tepi jalan umum sebagai tempat parkir.

⁶Bagus Santoso, 2004, *Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah*, Jakarta : LP3ES, hlm 21

Melihat fenomena dan permasalahan diatas dalam penerapan implementasi kebijakan parkir di tepi jalan umum, maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan kajian mendalam tentang pelaksanaan parkir yang dilaksanakan di Kabupaten Klaten dengan judul penelitian “**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (Kajian Pengaturan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan parkir di tepi jalan umum menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 dalam berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Klaten?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tempat parkir di tepi jalan umum menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011.

2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 dalam berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Klaten.

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil bagi penulis, pemerintah maupun masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berfikir serta ilmu pengetahuan masyarakat di bidang ilmu hukum administrasi negara dalam hal retribusi jasa umum khususnya tentang tempat khusus parkir.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca terkait tarif retribusi parkir.
- b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat karena dapat memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat dan masukan bagi pemerintah terkait pelayanan parkir.

D. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Bagir Manan berpendapat bahwa otonomi daerah mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Lebih terperinci, definisi otonomi daerah menurut

beliau adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan.⁷ Dampak perubahan yang luas dan mendasar khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Permasalahan yang di hadapi oleh daerah kabupaten/kota yaitu pengembangan kemampuan sumber daya manusia, pendistribusian sumber daya yang ada, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan keswadayaan, dan pembangunan hubungan yang harmonis.

Syafrudin mengatakan, bahwa otonomi daerah mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian tersebut adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Secara implisit definisi otonomi daerah mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas.⁸

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik pada daerah. Kebijakan tersebut untuk mewujudkan keinginan dan spirit penyelenggaraan pemerintah yang lebih mengutamakan asas desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab sebagaimana diisaratkan oleh UU No.22

⁷<http://www.ensikloblogia.com/2016/10/pengertian-otonomi-daerah-menurut-para.html>, diakses pada tanggal 27 Januari 2017, pukul 20.08 WIB.

⁸Ateng Syafrudin, 2009, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*, Cetakan ketiga, Penerbit Mandar Maju, hlm. 23.

tahun 1999 yang diperbarui dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.⁹

Pengaturan parkir merupakan salah satu dari kegiatan otonomi daerah yang dilakukan untuk mendorong sumber daya secara efisien serta digunakan untuk membatasi arus kendaraan. Berdasarkan teori negara hukum, maka pengaturan parkir harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan dengan berupa rambu larangan, rambu petunjuk, serta informasi agar masyarakat patuh terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir.

Parkir adalah suatu kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas maupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang. Parkir adalah sumber yang potensial bagi pemerintah dalam upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁰ Retribusi adalah salah satu faktor yang menentukan besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Retribusi dari sektor perparkiran menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan mengingat perubahan kondisi perekonomian di kota Klaten, semakin berkembangnya pusat-pusat pembelanjaan dan pusat-pusat hiburan

⁹Absori, 2014, *Hukum Ekonomi Indonesia. Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 165.

¹⁰Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2002 tentang Tempat Khusus Parkir.

yang berdampak pada kepadatan lalu lintas di ruas-ruas jalan. Supaya terwujud ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas perlu adanya pengelolaan yang baik dalam hal ini perparkiran terutama ditepi jalan-jalan umum.

Tarif parkir yang ditetapkan suatu daerah dengan daerah lainnya dapat berbeda-beda. Hal ini dilihat dari kemampuan dan kebutuhan masing-masing dari suatu daerah. Penyelewengan tarif parkir yang terjadi di suatu daerah, baik yang dilakukan oleh juru parkir dapat merugikan pemerintah daerah. Tarif parkir yang berubah-ubah dan tidak sesuai dengan Perda sangat merugikan kas daerah.¹¹ Biasanya perubahan tarif parkir tidak resmi dialami ketika diadakannya sebuah konser atau hiburan yang digelar.

Pemerintah hendaknya persuasif dan proaktif melakukan upaya pencegahan dan penertiban dengan langkah yang bijaksana. Penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan publik sehingga harus menimbulkan dampak yang bisa dinikmati. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan dan partisipasi masyarakat.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soetandyo Wignyosoebroto adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum

¹¹Abubakar, Iskandar dkk, 2008, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib*,. Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta, hlm. 123.

diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.¹² Pada penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum, dan implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 dan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Klaten.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris. Menurut Fajar dan Achmad penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang seharusnya manusia bertingkah laku. Unsur-unsur tersebut adalah: (1) norma dasar (*basic norm*), (2) asas-asas hukum, (3) Kitab Undang-Undang atau Perundang-undangan, (4) doktrin atau ajaran hukum, (5) dokumen perjanjian (kontrak), (6) keputusan pengadilan, (7) keputusan birokrasi, (8) segala bentuk dokumen yang dibuat secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat.¹³ Secara normatif, penelitian ini mengkaji norma-norma yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 dan bahan hukum lain yang terkait.

Adapun pendekatan empiris (*emperical legal research*) menurut Wignjosuebrotto dalam M. Syamsudin, dijelaskan bahwa hukum

¹²H. Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18.

¹³Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 38-39.

dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan. Hukum tidak lagi dikonsepsikan secara filosofis-moral sebagai norma *ius constituendum* atau *law as what ought to be*, dan tidak pula secara positif sebagai norma *ius constitutum* atau *law as what it is in the books*, melainkan secara empiris yang teramati di alam pengalaman. Hukum tidak lagi dimaknakan sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif di dalam suatu legistimasi yang formal. Dari segi substansinya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang terlihat secara sah, dan bekerja untuk memola perilaku-perilaku aktual warga masyarakat.¹⁴ Secara empiris, penelitian ini juga mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif. Menurut Zainuddin Ali, penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu karakteristik atau faktor-faktor tertentu.¹⁵ Menurut Syamsudin,¹⁶ analisis deskriptif adalah kegiatan pengkajian hasil olah data yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pada analisis ini kesimpulan yang

¹⁴M. Syamsudin, 2007. *Operasional Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 25-26.

¹⁵Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm.10.

¹⁶*Ibid*, hlm. 127.

diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini berupaya menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak dilapangan, dengan tujuan mendeskripsikan secara sistematis tentang implementasi parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Restribusi Jasa Umum.

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Alun-alun, Taman Kota, dan Kantor Dinas Perhubungan. Pengambilan lokasi ini karena dilokasi tersebut memungkinkan untuk memperoleh sumber data yang diperlukan.

4. Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut ini.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara.¹⁷ Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan untuk memperoleh keterangan atau fakta dilapangan melalui tanya jawab dengan warga masyarakat

¹⁷P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 87-88.

yang dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan, Alun-alun, dan Taman Kota.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.¹⁸ Bahan kepustakaan yang dimaksud adalah bahan hukum, yang terdiri atas:

1) Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.¹⁹ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Restribusi Jasa Umum.

2) Bahan hukum sekunder

¹⁸*Ibid*, hlm 78..

¹⁹*Ibid*, hlm. 47.

Menurut Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum; (b) kamus-kamus hukum; (c) jurnal-jurnal hukum; dan (d) komentar-komentar atas putusan hukum.²⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini, meliputi: buku-buku teks, hasil penelitian atau jurnal, kamus hukum, makalah yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer yang langsung didapatkan dari nara sumber atau informan di lapangan. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan dengan cara wawancara. Menurut Syamsudin, wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.²¹ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan nara sumber atau informan yang dianggap memahami permasalahan yang terkait dengan judul penelitian.

²⁰*Ibid*, hlm. 54

²¹M. Syamsudi, *Op.cit*, hlm. 108.

Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah (*directive interview*). Wawancara terarah dilakukan dengan cara: (1) ada rencana pelaksanaan wawancara, (2) mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban, (3) memerhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai, (4) membatasi aspek-aspek masalah yang diperiksa, (5) mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

Narasumber yang diwawancarai untuk mengumpulkan data primer, yaitu:

- 1) Pegawai Kantor Dinas Perhubungan Klaten.
- 2) Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Klaten.
- 3) Juru parkir di sekitar Alun-alun dan Taman Kota Kabupaten Klaten.
- 4) Warga masyarakat yang sedang memarkir kendaraannya di Alun-alun atau di Taman Kota Kabupaten Klaten.

b. Studi Kepustakaan

Menurut M. Syamsudin,²² studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.

Studi dokumen atau pustaka dalam penelitian hukum bertujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder

²²*Ibid*, hlm. 101.

yang dijadikan patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum.

Studi kepustakaan dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi, dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data sekunder yang lain, terkait dengan masalah yang akan diteliti. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama penelitian.

6. Metode Analisa Data

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun hasil penelitian secara sistematis, yaitu menjaga keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum yang lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.²³

Sifat analisis bahan hukum adalah preskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau

²³Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm.181.

penilaian mengenai benar atau salah atau yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁴

Adapun untuk mengolah data primer digunakan analisis kualitatif. Menurut Syamsudin,²⁵ bahwa pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Ini bukan berarti bahwa analisis kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh untuk menjawab permasalahan penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Bab ini terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini berisi tinjauan pustaka, yang menguraikan mengenai:

A. Negara Hukum

²⁴*Ibid*, hlm.184.

²⁵M. Syamsudin, *Op.cit*, hlm. 133.

- B. Otonomi Daerah
- C. Pendapatan Asli Daerah
- D. Retribusi Daerah
- E. Parkir

BAB III Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya menguraikan mengenai:

- A. Pengaturan parkir di tepi jalan umum menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011.
- B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 dalam berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Klaten.

BAB IV Bab ini menjelaskan Penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulis skripsi ini.